

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa Di KPADD Kabupaten Kayong Utara

Ika Meiria Dian Saraswati

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, E-mail : ikamds@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPADD) Kabupaten Kayong Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 11 orang pengelola perpustakaan desa yang dianalisis dengan bantuan Rumus Korelasi *Product Moment*, Rumus Koefisien Determinasi dan Rumus Regresi Linear Sederhana di program SPSS 18. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 0,585 atau setara dengan 58,5% dan sisanya 41,5% ditentukan oleh variabel lain. Selain itu, persamaan regresi antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dengan variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa adalah $Y = 0,811 + 0,738X$. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa angka koefisien regresi antara variabel x dan variabel y adalah 0,738. Koefisien ini berarti bahwa setiap penambahan satu nilai variabel kompetensi sumber daya manusia (X) berpengaruh terhadap peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 0,738 kali.

Kata Kunci: Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan, Perpustakaan Desa

Abstract

This research aims to identify and analyze the effect of competence of Human Resources (HR) on village library policy implementation at the Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah (KPADD) of North Kayong Regency. Data collected through distributing questionnaires to 11 people managing the village library were analyzed with the help of Product Moment Correlation Formula, Coefficient of Determination Formula and Simple Linear Regression Formula in SPSS 18. The results showed that the competence analysts Human Resources has a positive influence on the village library policy implementation or equal to 0.585 (58.5%) and 41.5% determined by other variables. In addition, the regression equation between variables competencies of Human Resources at the village library implementation of the policy variable is $Y = 0.811 + 0.738 X$. The regression equation shows that the regression coefficient between variables x and y variables is 0.738. This coefficient means that any increase in one variable value human resource competencies (X) can influence on policy implementation increased by 0.738 times the village library.

Key Words: Competence, Human Resources, Policy Implementation, Village Library

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kualitas warga negara merupakan masalah pembangunan yang harus ditangani Pemerintah Indonesia dalam era globalisasi. Hal ini

dikarenakan pentingnya warga negara di dalam suatu pemerintahan. Adanya warga negara yang berkualitas akan menyukseskan keberlangsungan

sistem pemerintahan di suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas warga negara sangat diperlukan. Melalui kebijakan-kebijakan inilah, pemerintah berharap kualitas warga negara dapat meningkat. Salah satu wujud dari peningkatan kualitas ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat.

Kompleksnya masalah kualitas warga negara atau penduduk di Indonesia selalu dirasakan di setiap daerah. Masalah ini juga turut dirasakan oleh Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten yang terbentuk pada Tahun 2007 atas otonomi daerah ini tergolong muda dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti dikutip dari Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka (KDA) Tahun 2011 diketahui bahwa angka IPM Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan angka selisih IPM dan angka selisih lama sekolah pertahunnya. Jika dilihat berdasarkan data yang ada, angka IPM dan angka lama sekolah di Kabupaten Kayong Utara terlihat meningkat, namun jika dihitung angka selisih peningkatannya maka akan diketahui bahwa angka selisih peningkatan tersebut mengalami penurunan. Berkaitan dengan data yang ada, berikut adalah data IPM dan lama sekolah Kabupaten Kayong Utara dari Tahun 2008-2010:

Tabel 1.

Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kayong Utara 2008-2010

No.	Tahun	Angka Indeks Pembangunan Manusia	Angka Kenaikan	Lama Sekolah	Angka Kenaikan
1.	2008	64,69	-	5,60	-
2.	2009	65,07	0,38	5,65	0,05
3.	2010	65,38	0,31	5,67	0,02

Sumber : Kabupaten Kayong Utara dalam Angka Tahun 2011

Apabila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010, angka IPM Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 berada

dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Barat yang senilai 69,15. Selain itu, jika angka IPM Kabupaten Kayong Utara dibandingkan dengan angka IPM 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat pada Tahun 2008, maka angka IPM Kabupaten Kayong Utara menempati urutan ketiga dari bawah. Namun, pada Tahun 2009 dan 2010 ranking angka IPM Kabupaten Kayong Utara mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan ranking angka IPM Kabupaten Kayong Utara yang menempati posisi kedua dari bawah (dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2011). Selain itu, angka IPM Kabupaten Kayong Utara tergolong pada tingkat menengah kebawah. Hal ini dikarenakan angka IPM Kabupaten Kayong Utara berada pada selang interval 50-65,5 (dalam Rakyat Kalbar,23/10/2011). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupaya meningkatkan angka IPM setiap tahunnya. Salah satu wujud dari upaya peningkatan angka IPM di Kabupaten Kayong Utara adalah dengan menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa.

Pada proses penerapan keputusan menteri tersebut, keputusan menteri dibantu dengan Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan dibentuk untuk menyediakan acuan tentang organisasi dan penyelenggaraan, koleksi, layanan, tenaga serta sarana prasarana yang berlaku pada perpustakaan desa atau kelurahan. Pada bagian koleksi, tenaga perpustakaan, dan penyelenggaraan perpustakaan, Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan menjelaskan beberapa hal, yaitu :

- (1) Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 100 judul per tahun;

- (2) Perpustakaan desa atau kelurahan dikelola sekurang-kurangnya 2 orang;
- (3) Setiap desa atau kelurahan menyelenggarakan perpustakaan desa atau kelurahan;
- (4) Perpustakaan desa atau kelurahan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa atau lurah.

Bentuk penerapan dari keputusan menteri ini, sejak tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah membangun sebelas perpustakaan desa di beberapa desa yang tersebar di enam kecamatan yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Kesebelas perpustakaan desa ini dikelola oleh pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara. Para pegawai pengelola perpustakaan desa ini terbentuk atas Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor:810/36/Kepeg Tahun 2012.

Hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan mengenai perpustakaan desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti mengetahui bahwa dari 43 desa di Kabupaten Kayong Utara, hanya 11 desa yang telah memiliki perpustakaan desa. Selain itu, sebagian besar perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara dikelola oleh 1 orang pengelola perpustakaan desa. Lebih dari itu, surat keputusan kepala desa tentang penetapan perpustakaan desa belum sepenuhnya dibentuk.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti menduga bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dikarenakan pengelola perpustakaan desa yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan sebagai pengelola perpustakaan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan perpustakaan desa.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan permasalahan penelitian ini adalah apakah

ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian.

Ketiga tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan kompetensi Sumber Daya Manusia
- b. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa
- c. Menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah serta masyarakat setempat, untuk menjadi pertimbangan dalam memajukan kebijakan perpustakaan desa dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain, yang saling berkaitan dengan kebijakan perpustakaan desa.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu program atau serangkaian tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah yang diusulkan dan dikerjakan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan dalam rangka mencapai tujuan yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Harold Laswell dan Abraham, Kaplan Carl I. Frederick, dan Thomas R.

Dye dalam Nugroho,2008:53-54). Selain itu, untuk kebutuhan diri sendiri, Riant Nugroho (2008:55) merumuskan definisi kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, peneliti dapat mengetahui bahwa setiap kebijakan publik memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur kebijakan publik adalah: program yang ditetapkan, pelaksana program, tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan untuk mengantar perubahan di kalangan masyarakat, dan didukung dengan potensi yang digunakan.

Selain definisi, kebijakan publik juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Secara sederhana kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Nugroho,2008:62):

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro yaitu kelima peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Pada penelitian implementasi kebijakan perpustakaan desa, peneliti menggunakan dasar hukum kebijakan setingkat kebijakan publik yang bersifat meso. Peneliti menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

3 Tahun 2001. Keputusan Menteri ini mengatur tentang perpustakaan desa.

Sehubungan di dalam penelitian ini dibatasi dalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan perpustakaan desa, peneliti perlu mengetahui arti implementasi. Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo 2008:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Selain itu, Ripley dan Franklin (1986:232) mengatakan bahwa ada tiga cara dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu: tingkat kepatuhan yang berlaku diukur dari tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang diatur, kelancaran pelaksanaan rutinitas ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi, dan terwujudnya kinerja dan tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan sebelumnya, suatu implementasi kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui faktor-faktor inilah, suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan. George C. Edward III (dalam Agustino 2006:150) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Komunikasi yang ditransmisikan secara tepat, akurat dan konsisten,
- b. Sumberdaya yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas,
- c. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan, dan
- d. Struktur birokrasi yang kondusif di dalam mengkoordinasikan kebijakan.

Jika peneliti melihat dari beberapa faktor yang ada, maka peneliti melihat bahwa sumber daya

utama di dalam implementasi suatu kebijakan adalah implementor itu sendiri (Sumber Daya Manusia). Kegagalan implementasi juga dapat disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Oleh karenanya, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya SDM yang cukup didukung keahlian dan kemampuan.

Sejalan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti melihat bahwasannya SDM merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi suatu instansi. Terdapat dua alasan yang menerangkan bahwa SDM merupakan unsur vital dalam suatu instansi. Pertama, SDM dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu instansi dalam melaksanakan tugas yang ada. Kedua, SDM juga merupakan pengeluaran utama instansi dalam menjalankan misi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila unsur SDM diabaikan, maka suatu organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Rachmawati,2008:1).

SDM yang ada selain harus tercukupi dan memiliki keahlian, SDM juga harus memahami cara melaksanakan dan mengetahui peraturan yang ada. Oleh karenanya, bukan hanya jumlah SDM yang tercukupi, tetapi keahlian yang ada harus disesuaikan pula dengan pekerjaan yang diembannya.

Seperti diungkapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 43/Kep/2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, keputusan ini mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal senada juga diungkapkan Moehariono (2009:17) bahwa kompetensi inti atau

kompetensi murni individu yang dimiliki pada setiap orang terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) atau dikenal dengan KSA. Lebih dari itu, menurut Mc. Clelland (dalam Sedarmayanti 2008:126) kompetensi (*competency*) diartikan sebagai karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Namun, untuk memudahkan pemahaman teknis terhadap kompetensi Moehariono (2009:16) mengungkapkan bahwa apabila seseorang ingin menjadi pemimpin yang baik atau pegawai yang berkinerja tinggi, maka harus memiliki kemampuan generik. Adapun kemampuan yang termasuk dalam kemampuan generik ini adalah:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian dan kualitas kerja, proaktif, dan kemampuan mencari informasi dan menggunakan informasi).
- b. Kemampuan melayani (empati dan berorientasi kepada pelanggan).
- c. Kemampuan memimpin (kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan).
- d. Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan orang lain, kemampuan mengarahkan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok).
- e. Kemampuan berfikir (kemampuan berfikir analitis, konseptual dan mempunyai keahlian teknis secara profesional).
- f. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi).

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 11 orang pengelola perpustakaan desa yang dijadikan responden. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dengan menguji r hitung lebih besar dari r kritis dan uji reliabilitas dengan *Alpha Cronbach*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*, rumus Koefisien Determinasi dan rumus Regresi Linear Sederhana di program SPSS 18.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Peneliti menyebarkan angket untuk mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penyebaran angket menjelaskan bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah perempuan sebesar 6 orang (55%). Selain itu, 5 orang responden (45%) berjenis kelamin laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara didominasi oleh perempuan. Selain itu, sebagian besar umur responden adalah 19-26 tahun, dengan jumlah 7 orang (64%), responden yang memiliki umur 27-34 tahun adalah 2 orang (18%) dan terdapat 2 orang responden (18%) yang memiliki umur 35-42 tahun. Jika peneliti melihat hasil pengelompokan responden berdasarkan umurnya, maka pengelola perpustakaan desa adalah manusia yang memiliki umur produktif. Lebih dari itu, tingkat pendidikan akhir responden sebagian besar adalah SMA/Paket C sebesar 91% dan terdapat 9% responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir Sarjana (S1).

Sesuai dengan hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, yaitu untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa di KPADD Kabupaten Kayong Utara, maka peneliti melakukan uji statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis yang menggunakan rumus korelasi *product moment*, rumus koefisien determinasi dan rumus regresi linier sederhana.

Peneliti menggunakan rumus korelasi *product moment* untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan diantara variabel dalam penelitian ini (kompetensi sumber daya manusia dan implementasi kebijakan perpustakaan desa). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18 maka diperoleh hasil besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Korelasi Antara Variabel X Dan Variabel Y

Correlations			
		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.765 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.006
	Sum of Squares and Cross-products	422.727	312.091
	Covariance	42.273	31.209
	N	11	11
Y	Pearson Correlation	.765	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	Sum of Squares and Cross-products	312.091	393.636
	Covariance	31.209	39.364
	N	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer yang diolah dari angket penelitian

Berdasarkan tabel korelasi di atas, peneliti melihat bahwa antara variabel x dengan variabel y terdapat hubungan. Besar hubungan antara kedua variabel dapat terlihat dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi antara kedua variabel yang peneliti gunakan adalah 0,765 selang kepercayaan 1%.

Selain analisis korelasi *product moment*, peneliti melakukan analisis koefisien determinan. Koefisien determinan dari kedua variabel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
1	.765 ^a	.585	.539	4.259

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas, koefisien determinasi (R^2) kedua variabel adalah 0,585 atau sama dengan 58,5%. Angka koefisien determinasi tersebut berarti bahwa sebesar 58,5% implementasi kebijakan perpustakaan desa dapat dipengaruhi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (variabel x), sedangkan sisanya 41,5% ($100\% - 58,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Jika peneliti berpijak pada hipotesis yang peneliti buat, yaitu :

Ho: $\rho = 0$, Tidak ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa

Ha: $\rho \neq 0$, Ada pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Kebijakan Perpustakaan Desa

Peneliti kemudian membandingkannya dengan hasil koefisien determinasi. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa peneliti menerima Ha dan menolak Ho. Artinya bahwa ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 58,5%.

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh antara variabel x (kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap variabel y (implementasi kebijakan perpustakaan desa). Oleh karena itu, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 18

for windows untuk menghitung pengaruh antar kedua variabel yang diteliti. Hasil dari pengolahan data untuk mengetahui pengaruh antara variabel x terhadap variabel y dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Variabel X terhadap Variabel Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.811	12.794		.063	.951
	.738	.207	.765	3.564	.006

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah dari angket penelitian

Berdasarkan tabel analisis regresi di atas, peneliti dapat melihat hasil dari analisis kedua variabel yang peneliti gunakan. Peneliti dapat membuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Jika peneliti merujuk kepada tabel analisis regresi di atas, maka persamaan regresi dari penelitian ini adalah :

$$Y = 0,811 + 0,738X$$

Keterangan :

Y = implementasi kebijakan perpustakaan desa

X = kompetensi sumber daya manusia

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ungkapkan pada bagian hasil penelitian, peneliti kemudian melakukan pembahasan. Adapun pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Responden dan Deskripsi Variabel

Berdasarkan deskripsi responden sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar pengelola

perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara berjenis kelamin perempuan dan berlatar belakang pendidikan SMA/Paket C. Selain itu, para pengelola perpustakaan desa di Kayong Utara juga tergolong pada usia yang produktif.

Sehubungan dengan hasil penyebaran angket, hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa pilihan responden terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia tergolong baik. Selain itu, hasil penyebaran angket juga menunjukkan bahwa pilihan responden terhadap variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa tergolong baik.

Penggolongan pilihan responden terhadap kedua variabel yang digunakan, peneliti menjabarkannya lebih lanjut. Peneliti kemudian menggolongkannya lagi dalam dimensi dan indikator-indikator yang digunakan. Hal ini terbukti dari sebagian kecil pengelola perpustakaan desa yang kurang baik pada kemampuan pengetahuan (kemampuan berfikir), kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan, kemampuan memimpin dan kemampuan melayani. Jika dikaitkan dengan deskripsi indikator, maka peneliti melihat bahwa kurang baiknya kemampuan pengetahuan dari pengelola perpustakaan desa dikarenakan latar belakang pendidikan yang sebagian besar SMA/Paket C. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya inilah yang membuat para pengelola kurang paham dalam bidang perpustakaan, sehingga kemampuan para pengelola untuk merencanakan dan mengimplementasikan, memimpin dan melayani menjadi kurang baik pula.

Penggolongan kategori pada hasil penyebaran angket juga berlaku pada variabel implementasi kebijakan. Pada variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa, hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori baik. Namun, peneliti juga masih menemukan hasil yang kurang baik pada

kelancaran pelaksanaan kebijakan dan kinerja serta tujuan yang dikehendaki, khususnya pada tujuan memberdayakan. Keadaan kurang baik pada sebagian dimensi implementasi kebijakan juga dapat disebabkan karena latar belakang pendidikan pengelola perpustakaan desa yang tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena belum terselesaikannya surat keputusan kepala desa atau kelurahan, sehingga para pengelola perpustakaan desa belum mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kebijakan dan mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Belum optimalnya kebijakan perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara yang disebabkan masih ada beberapa bagian kompetensi Sumber Daya Manusia yang kurang baik seharusnya juga menjadi perhatian bagi pemerintah, lebih khusus pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara. Hal ini menjadi penting mengingat kompetensi sumber daya manusia berperan penting terhadap implementasi kebijakan. Hal senada juga diungkapkan Edward III, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya tersebut dapat berwujud Sumber Daya Manusia, yakni kompetensi implementor (Subarsono,2011:91).

b. Analisa Korelasi

Berdasarkan hasil analisa data, peneliti memperoleh hasil bahwa korelasi antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini karena koefisien korelasi tidak disertai lambang negatif (-) dan nilai r hitung $> r$ tabel (1%). Selain itu, korelasi atau hubungan antar variabel tergolong hubungan yang kuat. Peneliti menyatakan hubungan antar variabel kuat karena membandingkan koefisien korelasi dengan tabel

pedoman interpretasi koefisien korelasi. Jika dilihat dari tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi, maka koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y dari penelitian ini tergolong kuat karena koefisien korelasi berada pada interval 0,60 - 0,799 (Sugiyono,2011:231). Jadi, hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa merupakan hubungan yang positif, signifikan dan kuat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa. Berdasarkan hasil perhitungan, sumbangan pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 0,585. Angka koefisien determinasi tersebut berarti bahwa sebesar 58,5% implementasi kebijakan perpustakaan desa dapat dipengaruhi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (variabel x), sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini.

d. Analisa Regresi Linear

Berdasarkan hasil analisa data, peneliti memperoleh hasil bahwa persamaan regresi antara variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan variabel implementasi kebijakan perpustakaan desa adalah:

$$Y = 0,811 + 0,738X$$

Persamaan regresi ini di atas menunjukkan bahwa angka koefisien regresi antara variabel x dan variabel y adalah 0,738. Koefisien ini berarti bahwa setiap penambahan satu nilai variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (X) berpengaruh terhadap peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan desa sebesar 0,738 kali.

D. PENUTUP

1. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka peneliti menarik simpulan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan desa secara umum tergolong dalam kualifikasi yang baik. Hal ini terbukti dari sebagian kecil pengelola perpustakaan desa yang kurang baik pada kemampuan pengetahuan (kemampuan berfikir), kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan, kemampuan memimpin dan kemampuan melayani.

Sebagian besar kompetensi pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Kayong Utara telah baik. Namun, masih ditemukan beberapa pengelola yang masuk pada kategori kurang baik. Hal ini khususnya pada indikator kemampuan memimpin, indikator kemampuan berfikir, indikator kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan dan kemampuan melayani. Oleh karena itu, peneliti membuat beberapa alternatif agar beberapa pengelola yang masuk kategori kurang baik dapat ditingkatkan hingga menjadi kategori baik ataupun kategori sangat baik. Adapun alternatif yang peneliti maksud adalah:

a. Pada indikator kemampuan memimpin, pengelola perpustakaan desa seharusnya lebih mampu untuk mempengaruhi para pengunjung perpustakaan untuk tetap aktif berkunjung ke perpustakaan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan hadiah kepada pengunjung yang rajin meminjam bahan perpustakaan setiap bulannya. Selain itu, pengelola juga harus membangun koordinasi yang baik dengan pihak aparat desa, pihak kecamatan dan pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara.

- b. Pada indikator kemampuan berfikir, pengelola perpustakaan desa seharusnya mendapatkan pembinaan lebih lanjut tentang keahlian teknis mengelola perpustakaan. Hal ini juga mengingat latar belakang pendidikan pengelola perpustakaan desa yang belum mengerti tentang perpustakaan. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan teknis dibidang perpustakaan perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, pengelola perpustakaan desa juga perlu mendengarkan saran-saran pengunjung perpustakaan yang berguna untuk kemajuan pelaksanaan kebijakan perpustakaan desa.
- c. Pada indikator merencanakan dan mengimplementasikan, pengelola perpustakaan desa harus lebih aktif mencari informasi terbaru dan menggunakannya untuk menyusun rencana kegiatan perpustakaan desa. Selain itu, perlu diadakan lomba antar perpustakaan desa di kabupaten agar motivasi para pengelola perpustakaan desa lebih meningkat.
- d. Pada indikator melayani, pengelola perpustakaan desa sebaiknya harus lebih aktif membantu pengunjung untuk mendapatkan bahan perpustakaan yang dibutuhkan.

Selain itu, implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara secara umum tergolong dalam kualifikasi baik pula. Namun, peneliti juga masih menemukan hasil yang kurang baik pada kelancaran pelaksanaan kebijakan dan kinerja dan tujuan yang dikehendaki, khususnya pada tujuan memberdayakan. Peneliti masih menemukan keadaan kurang baik pada dimensi kelancaran tugas serta kinerja dan tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, peneliti membuat beberapa alternatif agar implementasi kebijakan perpustakaan desa yang termasuk

kategori kurang baik dapat ditingkatkan hingga menjadi kategori baik ataupun kategori sangat baik.

Implementasi kebijakan perpustakaan desa terlihat kurang baik pada dimensi kelancaran pelaksanaan. Hal ini dikarenakan masih terdapat masalah-masalah yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan desa seharusnya mampu mempolitisi masalah-masalah yang sulit untuk diatasi. Kurangnya fasilitas ataupun ruang baca yang kurang representatif dapat pengelola diskusikan dengan para pengunjung ataupun pihak aparat desa dan pihak kecamatan. Alhasil keluhan-keluhan yang ada dilapangan bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan bantuan donatur-donatur pada level desa maupun kecamatan. Hal ini juga mengingat pembiayaan perpustakaan desa yang dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didukung dengan surat keputusan kepala desa ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain kelancaran pelaksanaan, implementasi kebijakan perpustakaan desa juga terlihat kurang baik pada kinerja dan tujuan yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan dari para kalangan pengusaha, masyarakat ataupun donatur dan kurangnya perbandingan dan kerjasama antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan desa seharusnya lebih aktif untuk melakukan perbandingan dengan perpustakaan sekolah yang terdekat. Kekurangan pada perpustakaan desa ataupun perpustakaan sekolah dapat saling diatasi secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tujuan perpustakaan desa yaitu menunjang pendidikan nasional.

Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan desa memiliki hubungan dan pengaruh dengan implementasi kebijakan perpustakaan desa. Hubungan antara kompetensi

Sumber Daya Manusia dengan implementasi kebijakan perpustakaan desa di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara tergolong kuat yaitu $r_{xy} = 0,765$. Oleh karena itu, peneliti dapat mengetahui bahwa besar pengaruh kompetensi Sumber daya Manusia terhadap implementasi kebijakan perpustakaan desa adalah sebesar 58,5% dan sisanya yaitu sebesar 41,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini. Selain itu, peningkatan implementasi kebijakan perpustakaan desa juga dapat diprediksi dengan penambahan nilai kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,738. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan dari segi variabel yang lain, yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan perpustakaan desa.

2. Keterbatasan Penelitian

Pada proses penelitian, penelitian ini belumlah sempurna. Kekurangan-kekurangan di dalam penelitian ini sejatinya dapat peneliti rasakan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki peneliti. Keterbatasan-keterbatasan ini adalah keterbatasan waktu dan jarak antar perpustakaan desa yang jauh. Sehubungan Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan program studi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura yang proses pendidikannya terikat oleh waktu, peneliti tidak dapat menjangkau dan mengamati keadaan seluruh perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Peneliti hanya bisa mengamati 3 perpustakaan desa dari jumlah seluruh perpustakaan desa yaitu 11. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino,Leo.2006.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:CV Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang.2011.*Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2011*.Ketapang:BPS Kabupaten Ketapang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2011. *Statistik Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Moehariono.2009.*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Nugroho,Riant.2008.*Public Policy*.Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Rachmawati,Ike Kusdyah.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta: ANDI.
- Ripley,Randall B. dan Grace A. Franklin.1986.*Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition)*. Chicago,Illinois:The Dorsey Press.
- Sedarmayanti.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bandung:Refika Aditama.
- Subarsono,A.G.,2011.*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:CV Alfabeta.
- Widodo,Joko.2008.*Analisis Kebijakan Publik*. Malang:Bayumedia Publishing.

Peraturan dan Keputusan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa / Kelurahan.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/Kep/2011 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : IKA MEIRIA DIAN SARASWATI

NIM / Periode Lulus : E42008067 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : ikamds@gmail.com / 08568934691

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DESA DI KPADD KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.../1/2013.....

Drs. H. Agus Ika, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

(IKA MEIRIA DIAN SARASWATI)